

# **IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS UNTUK MASYARAKAT MISKIN (RASKIN) DI DESA SUNGAI AMBAWANG KUALA KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA**

Oleh :  
**DEWI MAILANI**  
NIM. E21111075

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak, 2015

Email : [dewimmailani@gmail.com](mailto:dewimmailani@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: a). naiknya harga tebus beras miskin (raskin), b). kurang tepatnya waktu dalam pelaksanaan pendistribusian raskin, c). kualitas beras miskin yang disalurkan masih kurang layak, masih sering ditemukan ketidaksesuaian dalam kualitas beras antara lain berbau apek, berketu dan berwarna kuning, beras patah-patah dan terdapat benda asing. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam implementasi Program Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin) di Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya melalui variabel isi kebijakan yang mencakup aspek-aspek isi kebijakan yang terdiri dari: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Pendekatan teori yang digunakan oleh Edward III dalam mengukur suatu Implementasi Kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan seperti: a). komunikasi, b). sumber daya, c). disposisi dan d). struktur birokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Adapun hasil penelitian ditinjau dari aspek isi kebijakan yaitu pertama komunikasi, komunikasi yang masih kurang dalam bentuk sosialisasi sehingga masyarakat masih minimnya pemahaman mengenai program raskin tersebut, kedua sumberdaya dalam hal ini masih kurangnya fasilitas didalam implementasi program raskin di Desa Sungai Ambawang Kuala, ketiga disposisi yang merupakan sikap implementor yang masih kurang untuk mendukung dalam menjalankan implementasi program raskin dan keempat struktur birokrasi yang melibatkan banyak pihak sehingga menyebabkan implementasi program raskin membutuhkan waktu yang panjang dalam proses pelaksanaannya. Saran yang dapat diberikan sebagai masukan adalah sebagai berikut: Komunikasi diperlukan sebagai proses penyampaian informasi kebijakan perlu ditingkatkan lagi dengan diadakannya sosialisasi secara konsisten mengenai program raskin. Sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan. Sumber daya yang masih kurang memadai harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, karena setiap pelaksanaan implementasi program Raskin harus didukung oleh sumber daya yang memadai pula.

Kata-kata kunci : implementasi program beras untuk masyarakat miskin (raskin), komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

## **PROGRAM IMPLEMENTATION RICE FOR POOR PEOPLE (RASKIN) IN SUNGAI AMBAWANG KUALAKECAMATAN AMBAWANG RIVER KUBU RAYA.**

### **ABSTRACT**

The problem in this research are: a). the rising price of rice redeem the poor (Raskin), b). less precisely the time in the implementation of Raskin distribution, c). poor quality of rice distributed is still less worthy, are still often found discrepancies in the quality of rice, among others smelled musty, lice and yellow, rice broken and there is a foreign object. The purpose of this study was to describe the factors that influence in the implementation of Program Rice for Poor People (Raskin) in Sungai Ambawang Kuala Sungai Ambawang District stronghold Kingdom through variable contents policies include aspects of policy content consisting of : communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Theoretical approach used by Edward III in measuring an implementation of public policy it is necessary to know the variables and factors that influence a policy implementation such as: a). communication, b). resources, c). disposition and d). birokrasi. Metode structure used in this research is descriptive method. The research results from the aspect of the content of the policy that the first communication, communication is still lacking in the form of socialization so that the public is still a lack of understanding of the program Raskin, the two resources in this case was the lack of facilities in the implementation of the program Raskin in the village of River Ambawang Kuala three dispositions implementor is an attitude that is still lacking to support the implementation of the program running Raskin and fourth bureaucratic structures involving multiple parties causing Raskin program implementation takes a long time in the process of implementation. Advice can be given as an input is as follows: Communication is needed as the process of delivering information to the policy need to be improved socialization consistently holding the Raskin program. Human resources, budget and facilities that are relevant and sufficient to implement the policy. Resources are still inadequate should receive special attention from the government, because each implementation of Raskin program implementation should be supported by adequate resources as well.

Keywords: implementation of the program of rice for the poor (Raskin), communication, resources, disposition and bureaucratic structure.

### **A. PENDAHULUAN**

Beras Miskin (Raskin) adalah salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat yang miskin dan rawan pangan, agar mereka mendapatkan beras untuk kebutuhan rumah tangganya. Program raskin tersebut merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan Nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk

melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Pertimbangan tersebut mendasari hukum terbitnya Undang-Undang No. 18 tahun 2012, tentang Pangan dan Perarutan Pemerintah No. 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa.

Peraturan perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan program Raskin adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2013, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014
3. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003, tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog
4. Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
5. Keputusan Menko Kesra No. 57 Tahun 2012, tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat.

Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya. Lebih jauh, program raskin bertujuan untuk membantu kelompok miskin dan rentan miskin mendapat cukup pangan dan nutrisi karbohidrat tanpa kendala.

Program Raskin pada dasarnya merupakan kelanjutan dari Program Operasi Pasar Khusus (OPK) yang diluncurkan pada Juli 1998 di bawah Program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Pada tahun 2002, pemerintah mengganti nama OPK menjadi Program Raskin dengan tujuan agar lebih tepat sasaran. Berdasarkan buku pedoman umum Raskin telah diatur besarnya alokasi beras raskin untuk masyarakat miskin yaitu sebesar 15 Kg/Rumah Tangga Miskin/bulan selama 12 bulan dengan masing-masing seharga Rp. 1600,00/Kg (Netto) di titik distribusi. Adapun tujuan dari Program Raskin ini yaitu untuk memenuhi sebagai kebutuhan pangan (beras) sehingga diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran dari Rumah Tangga Miskin (RTM) sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan pokok dalam bentuk beras.

Berdasarkan petunjuk pelaksana (Juklak) yang terdapat di dalam buku pedoman umum raskin keberhasilan program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian yang biasa disebut dengan 6T yaitu:

1. Tepat sasaran, raskin hanya diberikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM).
2. Tepat jumlah, jumlah beras raskin yang merupakan hak RTS harus sesuai dengan

- ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan.
3. Tepat harga, harga beras yang dibayar keluarga sasaran penerima manfaat sebesar Rp 1.600,-/Kg netto di titik distribusi.
  4. Tepat waktu, waktu pelaksanaan penyaluran beras kepada RTS sesuai dengan rencana penyaluran yakni di adakan setiap bulan.
  5. Tepat administrasi, terpenuhnya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.
  6. Tepat kualitas, terpenuhnya kualitas beras yang sesuai dengan kualitas beras BULOG.

Namun dalam pelaksanaan program Raskin yang dilakukan oleh Desa Sungai Ambawang Kuala masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya seperti *pertama*, Sesuai peraturan, RTS-PM harga beras yang dibayar keluarga sasaran penerima manfaat sebesar Rp 1.600,-/Kg. Pada kenyataannya di lapangan, pendistribusian kerap tidak tepat harga dengan perencanaan awal, naiknya harga Raskin dengan harga Rp2.500,00/kg. Beras Raskin kerap ditebus dengan harga lebih mahal dari yang telah ditetapkan, *kedua*, kurang tepatnya waktu. Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada rumah tangga sasaran, seharusnya dilakukan setiap bulan. Pada kenyataannya, dalam pendistribusian Raskin mengalami keterlambatan selama

empat bulan. Hal ini disebabkan juga oleh kurangnya komunikasi dalam bentuk sosialisasi kepada RTS-PM mengenai hak yang seharusnya mereka terima, dan yang *ketiga*, kualitas beras miskin yang disalurkan masih kurang layak, masih sering ditemukan ketidaksesuaian antara lain berbau apek, berkutu dan berwarna kuning, beras patah-patah dan terdapat benda asing.

Berdasarkan hasil observasi penulis terhadap objek penelitian didapatkan beberapa indikasi permasalahan seperti : Pendistribusian Raskin Desa Sungai Ambawang Kuala selama empat bulan terlambat, Mengenai kualitas Raskin yang diterima oleh RTS-PM Desa Sungai Ambawang Kuala kurang layak, beras miskin berbau yang kurang baik, berkutu dan berwarna kuning dan Naiknya harga Raskin dengan harga Rp 2.500,00/kg.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka, fokus penelitian adalah Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi dalam Implementasi Program Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin) di Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

Adapun rumusan masalah yang dikemukakan sebagai berikut : “faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Program Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin) di Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya belum terlaksana dengan baik ?

## B. KERANGKA TEORITIS

Kebijakan yang baik tidak memiliki arti apa-apa jika tidak dapat diimplementasikan. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan.

Menurut Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2007:145) berpendapat bahwa:

“Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang berikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*trangible output*). Istilah Implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan dan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para perajabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan”.

Grindle (dalam Winarno, 2007:146) memebrikan pandangan tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, implementasi adalah

membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Mazmanian dan Sabatier (dalam Agustino, 2006:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengaur proses implemenasinya.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2006:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan, (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan dan (3) adanya hasil kegiatan.

Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya,

dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program dari individual projects apakah tujuan program tersebut tercapai (Agustino, 2006:139).

Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapat suatu hasil yang sesuai dengan tujuan dan dengan melalui proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Menurut Grindle (1980) (dalam Subarsono, 2008:93) keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Variabel isi kebijakan ini mencakup: (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran *target group* dalam isi kebijakan; (2) jenis manfaat yang diterima oleh *target group*; (3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; (4) apakah letak sebuah program sudah tepat; (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci (6) apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup: (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan

strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan (2) karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkausa (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Sedangkan menurut Edwards III (dalam Winarno, 2002:127) terdapat empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan diantaranya adalah (1) komunikasi, (2) sumber daya (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.

Dan menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Tachjan, 2008:57), variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan dari pada keseluruhan proses implementasi ada tiga katagori yakni, (1) mudah tidaknya masalah yang akan digarap/dikendalikan (2) kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya dan (3) pengaruh langsung sebagai variable yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.

Dari beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang telah dipaparkan diatas, sesuai dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti yakni untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program raskin maka peneliti mengambil teori dari Edward III. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edwards III (dalam Subarsono, 2008:90) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi kebijakan dipengaruhi oleh

empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.

### 1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Menurut Edward III (dalam Agustino, 2006:157) mendefinisikan komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik.

Faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga kualitas komunikasi akan mempengaruhi dalam mencapai efektivitas implementasi kebijakan

publik. Dengan demikian, penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan.

### 2) Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusiayakni implementor dan sumber daya financial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Sumber daya diposisikan sebagai *input* dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam *output*. Sedang secara teknologis, sumberdaya bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi (Tachjan, 2006:135)

### 3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat

demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Menurut Edward (dalam Winarno, 2002:142), bahwa kecenderungan-kecenderungan atau sikap aparaturnya merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Tetapi apabila tingkah laku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit. Menurut Edward yang dimaksud dengan sikap pelaksana adalah kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan kebijakannya.

#### 4) Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam

kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

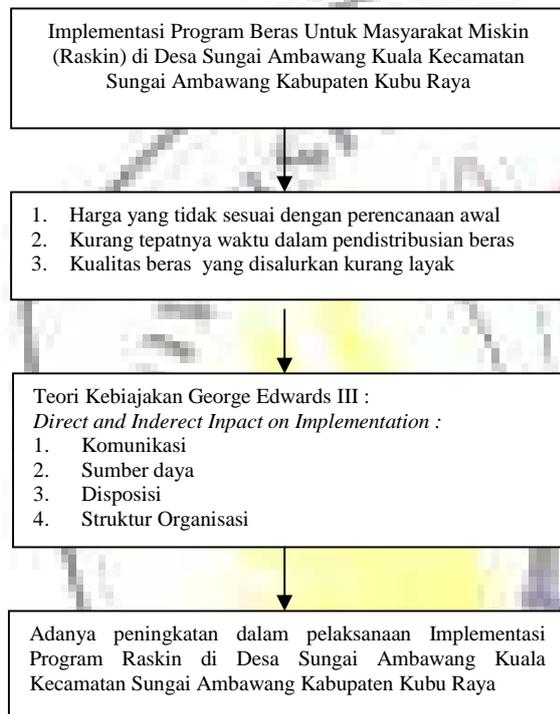
Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Berdasarkan hasil penelitian Edward III (dalam Winarno, 2005:152) menjelaskan bahwa SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi. Namun demikian, di samping menghambat implementasi kebijakan SOP juga mempunyai manfaat.

Dalam hal ini, peneliti akan meneliti mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Program Raskin (Beras Untuk Masyarakat Miskin) di Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, yang kemudian pengaruh dalam implementasi program raskin tersebut dikaji

menggunakan teori dengan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dengan menggunakan teori oleh Edward III yang terdiri dari (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi . Maka dalam kerangka pikir ini digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1**  
Kerangka Pikir Implementasi Program Raskin (Beras Untuk Rakyat Miskin)



### C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Dimana peneliti berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan misalnya kondisi atau hubungan mengenai implementasi kebijakan program raskin di Desa Sungai Ambawang Kuala serta yang bertujuan untuk

memperoleh gambaran secara faktual dan akurat mengenai faktor-faktornya. Lokasi penelitian ini di Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Adapun alasan peneliti memilih tempat tersebut karena Lokasi penelitian tersebut memiliki relevansi dengan topik penelitian yang akan penulis lakukan dan lokasi tersebut dipilih karena masih ada terdapat permasalahan yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan Program Raskin yang belum terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Sungai Ambawang Kuala, Ketua RT Desa Sungai Ambawang Kuala, Satuan Kerja Raskin Desa Sungai Ambawang dan Masyarakat penerima raskin Desa Sungai Ambawang Kuala.

Adapun teknik untuk menentukan subjek penelitian (informan) adalah dengan cara Purposive sampling. Pengertian purposive sampling menurut Sugiyono (2008:122) adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sehingga data yang diperoleh lebih representatif dengan melakukan proses penelitian yang kompeten dibidangnya. Instrumen penelitian berupa pedoman observasi, pedoman wawancara dan dokumen. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik analisa data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

mengacu kepada pendapat Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2007:91) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan dan analisis data adalah reduksi, *display dan diakhiri dengan verifikasi data.*

#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Edwards III yang dijadikan sebagai *grand theory* (teori utama) pada penelitian, pada bagian ini akan dideskripsikan secara sistematis dan diberikan analisis mengenai kondisi aktual berdasarkan data hasil wawancara dan observasi berdasarkan variabel isi kebijakan (*content of policy*) dan yang terdiri dari beberapa faktor : a) komunikasi, b) sumber daya, c) disposisi, dan d). struktur organisasi. Pendekatan Edwards III ini dikenal dengan istilah “*Direct and Indirect Impact on Implementation*”.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Raskin Di Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Edwards III dapat penulis deskripsikan dan

berikan analisis dalam penelitian ini sebagai berikut :

##### a. Komunikasi

Salah satu penentu utama dari suatu keberhasilan dalam implementasi kebijakan publik adalah komunikasi. Komunikasi diperlukan sebagai proses penyampaian informasi kebijakan kepada pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran. Dengan adanya komunikasi yang baik antara yang membuat kebijakan dengan target atau sasaran dari kebijakan publik tersebut, maka implementasi akan menjadi efektif apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan dengan bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Karena faktor komunikasi merupakan proses penyampaian informasi kebijakan kepada pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran. Agar implementasi berjalan efektif, maka mereka yang bertanggung jawab adalah untuk mengimplementasikan sebuah keputusan mesti tau apa yang semestinya mereka kerjakan. Tujuan dengan diadakannya sosialisasi tersebut adalah menyampaikan informasi tentang program Raskin kepada pihak masyarakat.

Program Raskin adalah sebuah program yang dirancang oleh Pemerintah,

program tersebut bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dari Rumah Tangga Miskin melalui distribusi beras murah. Berdasarkan buku Pedoman Umum Raskin tahun 2014 telah diatur besarnya alokasi beras miskin untuk masyarakat miskin yaitu sebesar 15 Kg/RTM/bulan selama 12 bulan dengan harga Rp. 1.600,-/kg Netto dititik distrbusi. Sementara yang bertanggung jawab dari distribusi beras dari gudang sampai ke titik distribusi di Kelurahan/Desa dipegang oleh Perum BULOG.

Agar pelaksanaan program berjalan dengan baik dan lancar, perlu dilakukan penjelasan atau sosialisasi berkaitan dengan program kebijakan raskin tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dalam melakukan proses implementasi berkaitan dengan komunikasi yang terjalin saat ini kurang baik. Karena pelaksanaan sosialisasi sangat jarang dilakukan kepada masyarakat sehingga pengetahuan masyarakat tentang raskin sangat minim. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pemerintah Desa terkait dengan sosialisasi tentang Raskin di Desa Sungai Ambawang Kuala yang mana diungkapkan oleh Kepala Desa Sungai Ambawang Kuala Bapak Fransiscus (49) menyatakan bahwa :

*Untuk sosialisasi program raskin di Desa Sungai Ambawang Kuala saya akui memang tidak pernah diadakannya berkaitan dengan sosialisasi. Karena*

*dari pihak implementor yang berkaitan dengan pelaksanaan program raskin masih kurangnya perhatian dari pihak implementor didalam pelaksanaan sosialisasi, sehingga kami dari pihak desa tidak melakukan sosialisasi berkenaan dengan program raskin ini, juga kami hanya bertugas sebagai penyalur raskin terhadap masyarakat miskin.*

Hal tersebut juga dinyatakan oleh Sumi (53) salah satu masyarakat miskin, mengatakan bahwa:

*Setahu saya tidak pernah diadakannya sosialisasi mengenai program raskin ini, saya saja dapat bantuan raskin ini karna diberitahukan langsung oleh pak RT nya. Jadi wajar kalau masyarakat awam seperti saya tidak tahu-menau mengenai apa saja ketentuan yang ada dalam bantuan beras miskin ini.*

Berdasarkan pernyataan informan dari wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai raskin dikarenakan kurangnya faktor komunikasi dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat sehingga pengetahuan tentang program raskin kurang dimengerti. Kurangnya sosialisasi dari para implementor pastinya akan berpengaruh pula pada proses implementasi, karena tanpa sosialisasi masyarakat tidak akan tahu tentang sebuah kebijakan.

Dari hasil penelitian mengenai faktor komunikasi pada implementasi program raskin di Desa Sungai Ambawang Kuala, diketahui bahwa dalam proses implementasi kebijakan raskin kurang melakukan sosialisasi kebijakan baik secara formal maupun informal. Sosialisasi akan tidak efektif jika dikaitkan dengan waktu sosialisasi yang jarang dilakukan oleh implementor. Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan hanya dengan mengumpulkan ketua RT dan RW kemudian diberikan informasi berhubungan dengan raskin. Adapun sosialisasi yang dilakukan secara informal dan tidak didukung dengan sosialisasi formal maka sosialisasi yang dilakukan tidak akan dapat menyampaikan maksud dan tujuan kebijakan secara utuh bahkan dapat memunculkan persepsi berbeda-beda di antara penerima informasi.

### **b. Sumber Daya**

Sumber daya merupakan faktor kedua dalam model implementasi yang dikemukakan oleh Edward III. Sumber daya merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat penting dalam proses implementasi. Tanpa ketersediaan sumber daya yang memadai maka pelaksanaan implementasi akan mengalami hambatan. Komponen sumber daya ini meliputi staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya

kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program. Dalam pengimplementasian kebijakan sumber daya manusia merupakan kunci bagi diselenggarakannya kebijakan karena manusia berada diposisi sebagai pengolah kebijakan dan merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu implementasi program.

Sumber daya lain yang termasuk penting adalah wewenang. Wewenang ini akan berbeda-beda dari satu program ke program yang lain serta mempunyai banyak bentuk yang berbeda-beda, seperti misalnya: untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan serat dana yang mencukupi tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan. Seorang pelaksana mungkin mempunyai staf yang memadai, mungkin memahami apa yang harus dilakukan, dan mungkin mempunyai wewenang untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa bangunan seperti kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, maka besar

kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil.

Edwerd III (dalam Winarno, 2002:138) mengatakan bahwa kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan mengenai sumber-sumber implementasi kebijakan adalah bahwa sumber-sumber kebijakan sangat penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Tanpa sumber-sumber, kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan di atas kertas mungkin hanya akan menjadi rencana saja dan tidak pernah ada realisasinya.

Dalam pelaksanaan implementasi program Raskin untuk masyarakat miskin di Desa Sungai Ambawang Kuala terdapat kendala yang dihadapi yaitu seperti kendala keterbatasan sumber daya yang didapat. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sumber daya dalam implementasi program raskin untuk masyarakat miskin di Desa Sungai Ambawang Kuala adalah sumber daya dari beras miskin itu sendiri berupa kualitas beras miskin yang didistribusikan kepada masyarakat yang menerima Raskin. Masih terdapat masalah dalam hal ini, masyarakat yang menerima beras miskin terkadang mendapatkan beras miskin yang kurang layak untuk di konsumsi dan masalah lainnya lagi masih adanya kendala dalam pengambilan beras miskin yang telah ditentukan sesuai waktunya. Berikut yang diungkapkan oleh bapak Suaidi selaku Sekretaris Desa (40):

*Mengenai implementasi program raskin ini memang masih terlihat mengalami kesulitan bagi masyarakat seperti halnya sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya fasilitas. Saya selaku Sekretaris Desa dalam menangani beras miskin ini masih ada saja hambatannya, salah satunya seperti dalam hal pelayanan untuk memberikan beras miskin kepada masyarakat masih belum optimal, terkadang pada waktunya pengambilan Raskin masyarakat tersebut belum dapat mengambil jatahnya dikarenakan kami selaku petugas tidak ada ditempat karena kami kan tidak stanbai disini kadang kami juga ada urusan lain diluar jadi mereka harus kembali lagi kesini untuk mengambil Raskin tersebut. Ada pula warga yang belum mengambil raskin dikarenakan berbagai alasan seperti sibuk kerja untuk cari uang agar bisa menebus beras miskin. Dalam pelaksanaan implementasi program raskin ini ada juga sedikit kendala di dalam penyediaan fasilitas berupa tempat penyimpanan raskin, untuk sementara raskin yang baru datang kami titipkan ke rumah ketua RT dan ada pula yang kami tampung dikantor desa karena fasilitas ruangan yang ada di kantor desa ini masih kurang memadai.*

Dari hasil wawancara peneliti tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan

sumber daya fasilitas sangat penting dalam meningkatkan keberhasilan dalam pendistribusian raskin yang ada di Desa Sungai Ambawang Kuala.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ali (37) sebagai penerima beras miskin:

*Beras Miskin ini sangat membantu bagi kami rakyat kecil yang kurang mampu, karena kalau dilihat dari penghasilan sehari-hari rase tak cukup untuk beli beras yang dijual dipasaran tapi dengan adanya beras miskin dari bantuan pemerintah cukuplah buat kebutuhan makan sehari-hari. Ye walaupun terkadang kualitas berasnye bede dengan yang biasa beli dipasar kadang-kadang beras miskin yang didapat ne baunye agak tengik teros biasa bekutu tapi saye selaku warga yang nerima raskin ne senanglah ketimbang tidak dapat.*

Dapat dilihat dari hasil wawancara bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program raskin yang berkaitan dengan sumber daya dalam memberikan atau mendistribusikannya terhadap masyarakat miskin. Tetapi ada juga masyarakat sangat senang dengan adanya program raskin ini karena dengan adanya program tersebut masyarakat merasa terbantu dalam meringankan beban perekonomian masyarakat yang menerima raskin.

### c. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam

pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Apabila suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi penyimpangan atau kekeliruan.

Kecenderungan atau karakteristik dari pelaksana kebijakan mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif guna mencapai suatu tujuan dan sasaran. Edward III (dalam Subarsono, 2010:91) menyebutkan bahwa disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau

penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

Dalam rangka pelaksanaan implementasi Raskin di Desa Sungai Ambawang Kuala masih ada saja permasalahan yang terjadi di dalam pelaksanaan salah satunya seperti kurang tepatnya waktu dalam pendistribusian Raskin dikarenakan Implementor yang menguasai substansi kebijakan yang dilaksanakan harus

sesuai ketentuan yang berlaku. Namun dalam beberapa hal, protes masyarakat masih terus bermunculan dalam proses pelaksanaan implementasi salah satunya mengenai waktu.

Hal diungkapkan dari pernyataan Kasi Kemasyarakatan Bahtiar (35) yakni : *Banyak warga yang bertanya kepada pihak desa mengenai mengapa masih suka telat atau lama dalam penyaluran raskin kemasyarakatan. Bahkan masyarakat menyalahkan pihak desa dibilangnya kami ini tidak serius dalam menangannya. Padahal keterlambatan itu disebabkan karena stok beras miskin masih belum tersedia dari BULOG yang menyebabkan masyarakat selalu menagih-nagih, kami disini hanya sebagai perantara dari pihak BULOG untuk membagikan beras miskin ini.*

Dalam pelaksanaan implementasi program Raskin, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pedoman teknis tersebut tidak sepenuhnya terlaksana. Disposisi implementor tidak sesuai dengan apa yang diamantakan dalam kebijakan yang dijalankan. Pada umumnya implentor telah mengetahui substansi dari kebijakan yang dijalankan, tetapi dengan bekal dan pengetahuan dan pemahaman mengenai kebijakan yang dijalankan tidak cukup baik untuk membentuk sikap atau disposisi implementor yang baik. Karakteristik dari seorang implementor berupa komitmen tidak ditunjukkan implementor dalam pelaksanaan

implementasi, hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya komitmen dari implementor dalam hal memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sehingga muncul ketidakpedulian implementor terhadap beberapa masalah yang dirasakan oleh masyarakat miskin.

#### **d. Struktur Organisasi**

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*Standard Operating Procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan

tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Para pelaksana kebijakan mungkin mengetahui apa yang harus dilakuakn dan mempunyai cukup keinginan dan sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, tetapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut biasanya tidak dapat terlaksana dengan baik karena terdapatnya kelemahan dari struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebagikan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalanya pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni:

”Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi”.

”Standard Operational Procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”. (Winarno, 2005:150). Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

Diungkapkan oleh Kasi Pemerintahan (37) mengenai SOP dalam penyaluran Raskin mengatakan :

*Program raskin disini melibatkan banyak pihak, sehingga memerlukan proses yang banyak pula agar bisa disesuaikan dengan prosedur yang ada yang telah ditentukan oleh pihak yang menyediakan raskin. adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penyaluran raskin ini seperti pihak pusat yang berwewenang membuat kebijakan, pihak bulog selaku penyedia beras miskin, pihak BPS yang bertugas mendata masyarakat yang layak menerima raskin serta pihak desa yang*

*membantu mendistribusikan beras miskin ke masyarakat miskin. Karena banyaknya proses dan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program raskin ini sehingga mengalami kesulitan jika mengalami masalah yang dihadapi.*

Dari pernyataan tersebut dapat kita ketahui bahwa jika dalam pelaksanaan suatu program melibatkan banyak pihak yang terlibat dalam struktur organisasinya, maka tidak diherankan jika masyarakat dalam hal ini mengalami masalah dan ingin mengurusnya maka mereka akan kebingungan jika terlalu banyak pihak yang bekerja di dalam pelaksanaannya.

SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi. Namun demikian, di samping menghambat implementasi kebijakan SOP juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru dari pada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini.

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan peneliti sebelumnya, maka beberapa kesimpulan yang dapat peneliti sampaikan berkenaan dengan faktor-faktor yang menyebabkan implementasi program beras untuk masyarakat miskin (RASKIN) di Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang belum berhasil, adapun faktor-faktor yang dimaksud di antaranya yaitu:

#### **a. Komunikasi**

Dalam implementasi program Raskin di Desa Sungai Ambawang Kuala masih mengalami kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh implementor. Hal tersebut dapat diketahui dari pernyataan masyarakat yang mengatakan kurangnya sosialisasi mengenai raskin. Apabila sosialisasi kurang efektif maka penyampaian dari substansi kebijakan tidak dapat tercapai sehingga apa yang diharapkan tidak sesuai dari kebijakan tersebut. Salah satu penyebabnya bahwa masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai raskin dikarenakan kurangnya diadakan komunikasi dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat sehingga pengetahuan tentang program raskin kurang dimengerti.

#### **b. Sumberdaya**

Sumber daya merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat penting dalam

proses implementasi. Tanpa ketersediaan sumber daya yang memadai maka pelaksanaan implementasi akan mengalami hambatan. Komponen sumber daya ini meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya fasilitas. Dalam hal ini, sumber daya manusia dalam hal memberikan pelayanan untuk pendistribusian Raskin masih belum optimal, dilihat dari sumber daya anggaran masih ada warga yang belum mengambil raskin dikarenakan belum cukup uang untuk menebusnya, dan dilihat dari sumber daya fasilitas masih terkendalanya berupa tempat atau ruangan penyimpanan raskin yang kurang memadai.

#### **c. Disposisi**

Disposisi atau sikap dari para pelaksana kebijakan dalam proses implementasi program raskin mengenai masalah di dalam kebijakan yang dijalankan tidak cukup baik untuk membentuk sikap atau disposisi implementor yang baik, dalam hal ini masih banyaknya masyarakat miskin yang mengeluh mengenai masalah keterlambatan pendistribusian raskin kepada masyarakat miskin mengakibatkan sikap pelaksana di Desa dalam menjalankan tugasnya sehingga akan memungkinkan pihak Desa melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan agar tidak menimbulkan masalah yang berbelit-belit. Bahkan kritik dan masukan dari masyarakat sering ditujukan kepada sikap implementor tetapi kurang didengar atau kurang

diperdulikan dari masukan masyarakat tersebut.

#### d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Program Raskin di Desa Sungai Ambawang Kuala yang terkait dalam bidang tugas kegiatan yang melakukan program raskin melibatkan banyak pihak sehingga tidak mudah untuk menyatukan langkah dalam melaksanakan tugas.

## 2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis sebagai suatu masukan adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi diperlukan sebagai proses penyampaian informasi kebijakan perlu ditingkatkan lagi dengan diadakannya sosialisasi secara konsisten mengenai program raskin.
2. Sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan. Sumber daya yang masih kurang memadai harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, karena setiap pelaksanaan implementasi program Raskin harus didukung oleh sumber daya yang memadai pula.

## F. DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku:

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Everroes. 2006. *Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi Kebijakan Publik*. Malang: PT. Program Penguatan Simpul Demokrasi.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Administrasi Publik: Model Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Satori, Djam'an & Aan Komariah. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono, AG. 2008. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka belajar.
- Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan*. Bandung: AIPI.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Implementasi Kebijakan*. Bandung: AIPI.
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- \_\_\_\_\_, Budi. 2007. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

[www.bulog.co.id](http://www.bulog.co.id) . Diambil tanggal tanggal 3 Desember 2014.

Monografi Desa Sungai Ambawang Kuala, 2014.

### **Skripsi dan Tesis**

Wahyuni, Tri. 2010. *“Implementasi Program Raskin (Beras Untuk Masyarakat Miskin) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin”*. (Skripsi)

Subroto. 2013. *“Implementasi Kebijakan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) Di Kabupaten Boyolali”*. (Tesis)

Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada.

### **Undang-Undang:**

Undang-Undang No 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 18 tahun 2012. Tentang Pangan.

Intruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008. Tentang Kebijakan Perberasan Nasional.

Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002. Tentang Ketahanan Pangan.

Keputusan Kepala Desa Sungai Ambawang Kuala No. 05 Tahun 2015. Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Wewenang Perangkat Desa.

Keputusan Menko Kesra No.57 Tahun 2012. Tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat.

Buku Pedoman Umum Raskin Tahun 2014 dari Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia.



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : DEWI MAILANI  
NIM / Periode lulus : E21111075/I  
Tanggal Lulus : 6 Agustus 2015  
Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi Negara  
E-mail address/ HP : [dewimmailani@gmail.com](mailto:dewimmailani@gmail.com) / 085750425245

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika\*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul\*\*):

IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS UNTUK MASYARAKAT MISKIN (RASKIN) DI  
DESA SUNGAI AMBAWANG KUALA KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN  
KUBU RAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*  
 *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui, disetujui  
Pengelola Jurnal Publika

Dr. Arifin S. Sos, M.AB  
NIP. 197105021997021002

Dibuat di : Pontianak  
Pada tanggal : 9 September 2015

DEWI MAILANI  
NIM. E21111075

Catatan :

\*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
(*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)